

PERTAMA DI INDONESIA, OMBUDSMAN SULTRA LAUNCHING PODCAST LAYANAN MASYARAKAT

Selasa, 09 November 2021 - Tety Yuniarti

Ombudsman Sulawesi Tenggara (Sultra) meluncurkan Podcast Sorot Ombudsman di Kantor Ombudsman Sultra, Kota Kendari, pada Selasa (09/11).

Podcast yang diluncurkan Ombudsman Sultra merupakan podcast pertama diseluruh Ombudsman se Indonesia.

Kepala Ombudsman Sultra, Masrti Susilo mengatakan, Podcast Ombudsman yakni Sorot Ombudsman pertama kali dibuka di Indonesia.

Tujuannya pengadaan Podcast tersebut adalah untuk mengikuti arus perkembangan digitalisasi sehingga perlu membuat terobosan dalam pengawasan pelayanan publik.

Penilaian Ombudsman RI mulai dari Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube, Ombudsman Sultra masuk kategori terbaik dalam pengelolaan YouTube.

"Kami masuk kategori dalam keaktifan dalam pengelolaan YouTube untuk pengawasan pelayanan publik. Hal ini yang menjadi dasar kami membuat ruang Podcast," ujar Mastri saat membawakan sambutan pada acara launching.

"Kami akan kupas terkait pengawasan pelayanan publik agar disaksikan langsung oleh masyarakat," lanjutnya.

Ditempat yang sama, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Heri Susanto, mengatakan selain ikut dalam launching Podcast Sorot Ombudsman di Sultra juga untuk melihat proyeksi Ombudsman RI Perwakilan pada tahun 2022 mendatang.

"Kami ke Sultra bertandang ke sini melihat proyeksi Ombudsman RI tahun 2022. Di sini ada terobosan ruang Podcast dan kami berikan apresiasi," ungkapnya.

Hery juga mengatakan, melalui program Podcast itu bisa menerapkan fungsi Ombudsman mulai dari pengawasan, menerima dan lain sebagainya.

"Saat ini masyarakat lebih melihat pola media sosial sehingga Podcast ini bisa menjadi wadah untuk menyampaikan laporan termasuk bagaimana prosedur pengawasan di Ombudsman RI dan Ombudsman Sultra ini bisa menjadi percontohan di daerah-daerah lainnya," jelasnya.

Ia menyebutkan, Podcast ini bisa meluas ke masyarakat, menjadi rana mediasi antara Ombudsman dan masyarakat.

"Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik bisa lebih diketahui secara umum dan bisa dijadikan pola oleh Ombudsman secara nasional bisa melakukan hal yang serupa juga upaya untuk menembus pemahaman publik terkait tupoksi Ombudsman," pungkasnya.